

ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KUTAI KARTANEGARA

Melinda, Elfreda Aplonia Lau, Ida Rachmawati
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : melinda.untag17@gmail.com

Keywords :

*Realization, Variance
Effective, efficiency,
APBD*

ABSTRACT

This study aims to compile a Budget Realization Report (LRA) in which there are ratios with criteria. The theory used in this research is government accounting standards and the hypothesis stated is that the APBD income variance is not good, very low regional independence, the effectiveness of PAD is very ineffective, the variance of APBD spending is not profitable. The analytical tool in this study uses descriptive and quantitative methods that is by studying government accounting standards applied in the field so that there are differences with the phenomena and fields in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kutai Kartanegara.

Based on the results of the study, then it can be concluded that regional revenue has not been able to obtain income exceeding the amount budgeted and has not been able to increase the regional original revenue including its resources. Whereas regional expenditures for operating expenditure and capital expenditure on total regional expenditures have not been fully able to increase harmony with total regional expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja (APBD) Kutai Kartanegara rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah dan Realisasi APBD tergantung dari Dana Perimbangan Pusat atau Dana Bagi Hasil (DBH). Survei yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dianggarkan pada BPKAD Kutai Kartanegara. Hal ini mengakibatkan anggaran yang ditetapkan oleh BPKAD Kutai Kartanegara, sehingga tidak terlaksana dengan baik karena dana belum seluruhnya yang ditransfer oleh pemerintah pusat. APBD murni dan perubahan tahun 2017 Dana yang ditransfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dipasang 97% sebesar Rp. 2.049.273.824.000,-

yang disalurkan sampai triwulan ke III sebesar Rp. 1.480.156.905.195,-. Dalam 1 tahun anggaran ada IV triwulan dan akan di transfer setiap 3 bulan, dan dana kurang salur 68% triwulan ke IV sebesar Rp. 569.016.908.805,- karna tidak di transfer oleh Pemerintah Pusat triwulan yang ke IV maka dana kurang salur ini baru digunakan tahun berikutnya sebesar Rp. 1.480.156.905.195,- dan begitu seterusnya setiap tahun.

Fenomena diatas menunjukkan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 bahwa varian (selisih) pendapatan kurang baik, kemandirian daerah rendah sekali, eektivitas PAD tidak efektif, varians (selisih) belanja tidak menguntungkan, belanja operasi tidak serasi, belanja modal tidak serasi dan efesiensi belanja daerah tidak efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sesuai dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dengan judul : **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis varians (selisih) Pendapatan APBD sudah baik ?
2. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis kemandirian daerah sudah tinggi ?
3. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis eektivitas PAD sudah sangat efektif ?
4. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis varians (selisih) belanja APBD sudah menguntungkan ?
5. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis belanja operasi sudah sangat serasi?
6. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis belanja modal sudah sangat serasi ?
7. Apakah APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara tahun 2017 dilihat dari analisis efesiensi belanja daerah sudah efisien ?

DASAR TEORI

Akuntansi

Akuntansi dari segi bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja “to account” yang berarti memperhitungkan. Account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akun atau perkiraan. Menurut *Charles T. Horngren.et, al. (2012:2)* : “Accounting is the information system that mesures business activity, process the data into reports, and communicates the resulults to decision markers”. Akuntanso adalah system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengelolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan.

Al. Hariono Jusuf (2011:4) Mendefinisikan “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, kepada para pengambilan keputusan. Akuntansi merupakan “bahasa bisnis” karna dengan akuntansisebagai informasi bisnis dapat dikomunikasikan”.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik dengan segala kekhasannya sistem dan lingkungannya tidak terlepas dari organisasi yang mempengaruhinya. Dibawah ini ada beberapa Pengertian Akuntansi Sektor Publik menurut para ahli pada dasarnya mempunyai arti yang sama sebagai berikut :

Menurut Indra Bastian (2010:3) Beranggapan bahwa :

Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan department-departement dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Menurut Baharulah Akbar (2013:39) Ciri Dasar Akuntansi Pemerintah adalah : Akuntansi Keuangan Pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berada dengan akuntansi komersial,:

- a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba. Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber tersebut yang diperoleh.
- b. Tidak ada kepentingan pemilik, pemerintah memiliki kekayaan tersendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan deviden pada akhir tahun tutup buku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Lampiran III, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintahan daerah, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut para ahli sebagai berikut :

Nurlan Daries (2009:32), APBD adalah :

Rencana keuangan tahunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeliran pembiayaan.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja APBD secara umum yang menggambarkan suatu pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi dan misi organisasi.

Mahmudi (2010:121) Menyatakan bahwa Kinerja APBD adalah :

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bias diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan individu maupun kelompok. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karna tidak adanya tolak ukurnya, diantaranya sebagai berikut :

Analisis Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian yang lebih besar berarti daerah tidak lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi sudah tidak memerlukan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah melakukan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karna itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran secara tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Alat analisis

Analisis Pendapatan Daerah

1. Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan
2. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$
3. Rasio Eektivitas Pendapatan Asli Daerah = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Analisis Belanja Daerah

1. Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

2.	Rasio Belanja Operasi	=	$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	x 100%
3.	Rasio Belanja Modal	=	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	x 100%
4.	Rasio Efisiensi Belanja Daerah	=	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	x 100%

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Analisis Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil Analisis Pendapatan Daerah tahun 2017 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara, disajikan rekapitulasi hasil analisis sebagai berikut :

1.	Varians Pendapatan Tahun 2017	=	Rp. 3.402.599.166.648,75 – Rp.4.035.144.602.108,89	
		=	– Rp. 632.545.435.469,14	
2.	Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2017	=	$\frac{\text{Rp. 453.397.588.009,56}}{\text{Rp. 26.706.980.000,00}}$	x 100%
		=	16,98%	
3.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	=	$\frac{\text{Rp. 435.513.161.873,75}}{\text{Rp. 453.397.588.009,56}}$	x 100%
		=	96,06%	

Analisis Belanja Daerah

1.	Varians Belanja Tahun 2017	=	Rp. 3.189.732.113.185,00 – Rp. 4.404.430.449.920,70	
		=	–Rp. 121.464.833.673,57	
2.	Rasio Belanja Operasi Tahun 2017	=	$\frac{\text{Rp. 2.638.934.028.493,00}}{\text{Rp. 4.404.430.449.920,70}}$	x 100%
		=	59,92%	

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{Rasio Belanja} &= \frac{\text{Rp. 548.024.205.422,00}}{\text{Rp. 4.404.430.449.920,70}} \times 100\% \\
 \text{Modal Tahun} & \\
 \text{2017} & \\
 &= 12,28\% \\
 \\
 4. \quad \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. 3.189.732.113.185,00}}{\text{Rp. 4.404.430.449.920,70}} \times 100\% \\
 \text{Belanja Daerah} & \\
 \text{Tahun 2017} & \\
 &= 72,43\%
 \end{aligned}$$

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dikemukakan bahwa :

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah, belum mampu melebihi dari jumlah anggaran terdapat realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan. Hal ini dikemukakan angka Varians Pendapatan ditahun 2017 sebesar –Rp.632.545.436.469,14-, menunjukkan kriteria kurang baik yang mendukung hipotesis diterima.
2. Analisis Rasio Kemandirian Daerah, belum mampu mencapai kemandirian daerah terlihat bahwa rendahnya dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan sehingga ketergantungan dana bagi hasil dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikemukakan angka rasio Kemandirian Daerah ditahun 2017 sebesar 16,98%, menunjukkan kriteria 0 - 25% rendah sekali yang mendukung hipotesis diterima.
3. Analisis Rasio Efektivitas PAD, belum sepenuhnya mampu pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dengan mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dalam merealisasikan dan pemanfaatan penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dikemukakan angka Rasio Efektivitas PAD ditahun 2017 sebesar 96,06%, menunjukan kriteria 90 - 99% cukup efektif yang mendukung hipotesis diterima.
4. Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah, mampu merealisasikan belanjanya terlihat bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggaran. Hal ini menyatakan angka Varians Belanja ditahun 2017 sebesar –Rp.121.464.833.673,57-, menunjukkan kriteria menguntungkan yang mendukung hipotesis ditolak.
5. Analisis Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, belum sepenuhnya mampu menyesuaikan keserasian realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah terlihat sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi. Hal ini menyatakan angka total belanja operasi dengan total belanja daerah ditahun 2017 sebesar 59,92%, menunjukkan kriteria rasio keserasian belanja >40 - 60 cukup serasi yang mendukung hipotesis diterima.
6. Analisis Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja, belum mampu menyesuaikan keserasian realisasi belanja modal dengan total belanja daerah terlihat sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini menyatakan angka total belanja modal dengan total belanja daerah ditahun 2017 sebesar 12,28%, menunjukkan kriteria rasio keserasian belanja 00 - 20 tidak serasi yang mendukung hipotesis diterima.
7. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah, mampu mengatasi penghematan belanja terlihat bahwa realisasi belanja kurang dari anggaran belanja atau tidak terdapat angka melebihi dari anggaran, dengan rasio efisiensi kurang dari 100%. Hal ini menyatakan angka efisiensi belanja daerah ditahun 2017 sebesar 72,43%, menunjukan kriteria efisiensi yang mendukung hipotesis ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara dikatakan kurang baik dalam merealisasikan pendapatan yang jumlahnya dibawah dari anggaran. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, karena terlihat bahwa realisasi pendapatan tidak mampu melebihi jumlah anggaran.
2. Rasio Kemandirian Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara rendah sekali dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, karena sumber penerimaan daerah masih belum maksimal dikarenakan kurang memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai saat ini tidak dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, sehingga ketergantungannya dana perimbangan dan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara cukup Efektif pencapaian tujuan secara tepat atau tepat sasaran dalam mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, karena cukup merealisasikan dan pemanfaatan dalam penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.
4. Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara, menguntungkan terlihat realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak, karena dalam perencanaan anggaran mampu merealisasikan belanja sekecil mungkin dari anggaran sehingga tidak terjadinya kelemahan atau tidak menguntungkan dalam perencanaan anggaran.
5. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara cukup serasi antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, karena sebagian kecil dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi.
6. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara tidak serasi antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, karena sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal.
7. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara efisiensi terlihat realisasi belanja kurang dari anggaran belanja. Sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak, karena menunjukkan penghematan dalam Realisasi Belanja tidak terdapat angka melebihi dari anggaran dan tidak terjadinya pemborosan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara. Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara tahun 2017, Pendapatan Daerah sebaiknya mengupayakan pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga sumber dayanya dan belanja Daerah untuk belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja agar lebih mampu meningkatkan keserasiannya dengan total belanja daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya lebih mendalami mengenai kinerja realisasi keuangan pada Pemerintah Daerah dan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat juga diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren, Charles T. et. al 2012. *Accounting. New Jersey* : Pearson Prentice Hall
- Jusuf, Al Haryono. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi*. Cetakan Satu, Edisi Tujuh, STIE YKPN Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta
- Akbar, Bahrullah. 2013. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan 1. Jakarta : CV. Bumi Metro Raya
- Anonim. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang *Setandar Akuntansi Pemerintah*
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* (Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta